

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK DAERAH DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH :

Nama : Dwi Novaliana Saputri
NIM : 22 2008 071



**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK DAERAH DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

**Nama : Dwi Novaliana Saputri
NIM : 22 2008 071**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2012**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Novaliana Saputri
NIM : 22 2008 071
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang.....

Penulis



Dwi Novaliana Saputri
Dwi Novaliana Saputri

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS
PAJAK DAERAH DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

Nama : Dwi Novaliana Saputri
NIM : 22 2008 071
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal.....


Pembimbing

(Lis Djuniar, S.E, Ak)
NIDN / NBM : 0220067101/1115716

Mengetahui
Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi




Drs. Sunardi, S.E, M.Si
NIDN / NBM : 0206046303 / 784021

Motto :

Semua keberhasilan terbaik Anda, datang setelah kekecewaan besar yang anda hadapi dengan sabar. Jika upaya Anda gagal, anda sudah berdoa dan meminta tolong, sudah mencoba lagi tetapi tetap gagal, dan anda pribadi yang jujur, bekerja keras, dan patuh kepada Tuhan apalagikah yang bisa Anda andalkan, kecuali KESABARAN.

(Mario Teguh)

Kupersembahkan kepada :

- ❖ Ayah dan Ibuku Tercinta
- ❖ Ayug Mega, Adikku Avin, Vira dan Via yang kusayangi
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuangan di kampus
- ❖ Almamaterku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”.

Tugas akhir atau skripsi adalah salah satu syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan jenjang Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir atau skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan, pengarahan, petunjuk, bantuan, serta saran-saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua (Ilyas dan Kowiah) yang telah memberikan doa serta nasihat-nasihat. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lis Djuniar, S.E, M.Si. yang telah membimbing serta memberikan pengarahan dan saran-saran dengan baik dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir atau skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Hal ini mengingat keterbatasan baik ilmu maupun pengalaman yang penulis miliki.

Keberhasilan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang dan dalam penulisan tugas akhir atau skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini dengan senang hati penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Idris, S.E, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak M. Taufik Syamsuddin, S.E, Ak., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Drs. Sunardi, S.E, M.Si dan Ibu Welly, S.E, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Betri, S.E, Ak., M.Si dan Ibu Lis Djuniar, S.E, M.Si. selaku Pembimbing Akademik dan juga Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu, membimbing, mendidik, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga tugas akhir atau skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis, sehingga tugas akhir atau skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ayah, Ibu, serta keluarga yang telah memberikan bimbingan, nasihat-nasihat, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini dengan baik.

7. Sahabat-sahabat senasib dan seperjuangan dalam menyusun skripsi ini (Rina, Yani, Renia, Wati, Erizka, Rianty, Yuni, Windu) terimah kasih atas bantuan dan kebersamaannya selama ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini.
9. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang telah memberikan izin kepada penulis guna kelengkapan data. Terimah kasih atas kerja samanya.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah penulis dari awal sampai akhir.
11. Seseorang yang membuatku jadi semangat yang selalu mendoakan keberhasilan dan kebahagiaanku.
12. Teman – teman angkatan 2008 khususnya jurusan Akuntansi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

Penulis hanya bisa berdoa dan meminta kepada Allah SWT agar kebaikan maupun amal Bapak/Ibu serta semua pihak yang terkait dalam penulisan tugas akhir atau skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin Ya Robbal Allamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2012

Penulis

Dwi Novaliana Saputri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	iv
HALAMAN DAFTAR ISI	vi
HALAMAN DAFTAR TABEL	ix
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	x
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	5
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya.....	8
B. Landasan Teori.....	8
1. Pendapatan Asli Daerah.....	8
a. Pengertian Pajak daerah.....	8
b. Unsur – unsur PAD.....	8

c. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD.....	9
2. Pajak daerah	9
a. Pengertian Pajak Daerah.....	9
b. Jenis – Jenis pajak Daerah	11
c. Tarif Pajak.....	13
d. Objek Pajak daerah.....	14
e. Subjek Pajak daerah.....	16
f. Upaya-upaya meningkatkan pajak daerah	17
g. Tata cara pembuatan peraturan daerah tentang Pajak.....	18
h. Kontribusi pajak daerah	19
3. Hubungan Antara pajak dengan pendapatan	20
a. Menurut golongan	20
b. Menurut sifat	20
4. Efektivitas.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	23
B. Tempat Penelitian	23
C. Operasionalisasi Variabel	23
D. Data yang Digunakan.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	27
1. Gambaran Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	37
2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	37
3. Tujuan, sasaran dan kebijakan.....	38
4. Tugas dan Fungsi.....	30
B. Pembahasan	38
1. Kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan PAD kota Palembang	39
a. Perhitungan kontribusi objek-objek pajak daerah Terhadap total penerimaan pajak daerah.....	41
2. Upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD Dikota Palembang	47

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data realisasi penerimaan pajak daerah dan objek pajak daerah Kota Palembang.....	3
Tabel I.2 Data PAD dan kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan PAD pada dinas pendapatan daerah kota palembang.....	4
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	23
Tabel IV.1 Kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan tingkat Efektivitas.....	40
Tabel IV.2 Kontribusi objek pajak daerah terhadap pajak daerah Kota Palembang Tahun 2009-2011	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Riset dari Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

Lampiran 2 : Kartu Aktivitas bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Sertifikat Ngaji

Lampiran 4 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Dwi Novaliana Saputri/222008071/2012/Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kontribusi dan efektivitas pajak daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Tujuannya adalah untuk mengetahui kontribusi dan efektivitas pajak daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, almamater.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui nilai yang variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dokumentasi. Analisis yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah kontribusi pajak daerah dan upaya – upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab empat, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pajak daerah dalam hal kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang belum efektif.

Kata Kunci : Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah

ABSTRACT

Dwi Novaliana saputri/222008071/2012/The analysis of contribution and effectiveness of Local Tax in Increasing the Local Revenue at the Department of revenue Palembang.

The objective was how the contribution and effectiveness of local tax in increasing the local revenue at the department of Revenue Palembang. The objective was to find out the contribution and effectiveness of local tax in increasing the local revenue at the Department of revenue Palembang. This study is expected to be beneficial for the writer, the department of Revenue Palembang, and almamater.

This study was descriptive study. The data used were primary data. The technique for collecting the data included documentation. The data were analyzed qualitatively and quantitatively. The variabels of study were the contribution of local revenue and the attempts increasing the local revenue.

Based on the findings, it can be concluded that the contribution and effectiveness of local tax in increasing the local revenue at the department of revenue Palembang was good enough but was not effective yet.

Key word: contribution and the effectiveness of local tax

Pajak daerah selain bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD juga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, Pemerintah daerah perlu berusaha menciptakan sumber penerimaan baru atau memaksimalkan kembali sumber penerimaan yang sudah ada yang kegiatan usahanya dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan dalam hal ini adalah pajak daerah.

Upaya – upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi pajak daerah diantaranya melakukan pendekatan kepada masyarakat berupa sosialisasi secara rutin kepada wajib pajak, serta perluasan objek pajak daerah. Dengan adanya langkah - langkah tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk membayar pajak, sehingga potensi pajak daerah mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam hal penerimaan pendapatan asli daerah. Berikut ini adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2009 – 2011.

Tabel I.1
Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Objek Pajak Daerah
Kota Palembang

No	Keterangan	Realisasi Penerimaan		
		2009	2010	2011
1	Pajak Daerah	84.696.563.176.60	104.074.313.437.00	207.746.349.410.40
2	Objek Pajak Daerah :			
	a) Pajak Hotel	10.353.748.458.60	14.094.700.545.00	18.596.699.903.00
	b) Pajak Restoran	16.095.416.841.00	19.226.002.354.00	24.303.405.188.50
	c) Pajak Hiburan	4.366.158.504.00	5.113.107.739.00	5.967.246.597.00
	d) Pajak Reklame	4.225.282.834.00	4.603.540.213.00	7.937.771.136.00
	e) Pajak Penerangan Jalan PLN	47.266.315.254.00	58.035.666.496.00	69.004.384.193.00
	f) Pajak penerangan jalan non PLN	0	0	2.230.546.054.00
	g) Pajak mineral bukan logam dan bantuan	0	0	85.954.037.00
	h) Pajak Parkir	1.889.528.090.00	2.373.884.593.00	3.816.026.337.00
	i) Pajak air bawah tanah	0	0	6.651.000.00
	j) Pajak burung walet	0	0	78.530.000.00
	k) Bea perolehan atas tanah dan bangunan	0	0	74.946.134.964.40
	l) Pajak pengelolaan galian gol. C	540.113.195.00	600.411.497.00	

Sumber : *Dispenda Kota Palembang, tahun 2012*

Dari tabel I.1 di atas dapat dijelaskan bahwa adanya peranan yang cukup potensial dari sektor pajak daerah yang terlihat dari realisasi penerimaan pajak daerah yang mengalami peningkatan sehingga pajak daerah mempunyai peranan yang cukup besar dalam hal kontribusi terhadap Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Tabel I.2
Data Pendapatan Asli Daerah Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap
Penerimaan PAD Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pajak Daerah
1	2009	1.219.171.711.299,20	84.696.563.176.60
2	2010	1.648.325.888.374.66	104.047.313.437.00
3	2011	1.917.931.790.520.91	207.746.349.410.40

Tabel I.2 pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2009-2011 mengalami peningkatan. Gambaran kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total perolehan PAD di Kota Palembang, sehingga dapat dikaji sejauh mana tingkat efektivitas dari pemanfaatan sumber - sumber keuangan daerah terutama dari sektor pajak daerah

Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah secara umum setiap tahunnya tidak terlepas dari adanya beberapa potensi dari sektor pajak daerah itu sendiri. Potensi dari pajak daerah itu sendiri salah satunya bisa dilihat dari makin bertambahnya jumlah objek pajak daerah tersebut, semakin besarnya pertumbuhan jumlah objek pajak daerah semakin besar pula potensi yang ada di suatu daerah dari sektor pajak daerah.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana kontribusi dan efektivitas pajak daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi dan efektivitas pajak daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang penilaian kinerja pemerintah melalui pengetahuan penulis yang telah dipelajari

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dinas pendapatan daerah untuk mengambil kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang ekonomis, efisien dan efektivitas

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka bagi almamater dan dapat menjadi referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ogan Ilir. Telah dilakukan oleh Darul Qutni (2007). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana kontribusi pajak daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Ogan Ilir. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Ogan Ilir. Operasional Variabel dalam penelitian tersebut ada dua yaitu Kontribusi Pajak Daerah dan Upaya – upaya untuk meningkatkan PAD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian Deskriptif. Dalam penelitian ini yang digunakan penulis adalah penelitian Deskriptif. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumentasi yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, data sekundernya berupa sejarah singkat, struktur organisasi, Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dokumentasi, Dokumentasi yaitu dilakukan pengumpulan dokumen/data yang relevan mengenai daftar target dan realisasi pajak daerah, serta data mengenai realisasi penerimaan PAD Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Perbedaan dalam penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang

mana penelitian sebelumnya yaitu dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

B. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:132) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b. Unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah

- 1). Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah
- 2). Retribusi Daerah

Menurut Suparmoko (2002:87) jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan menjadi retribusi yang dikenakan pada jasa umum,

retribusi yang dikenakan pada jasa usaha. dan retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu.

- 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara.

c. Upaya-upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan kenaikan pendapatan yang diperoleh pada tahun berikutnya dari sumber-sumber pendapatan daerah. Menurut Halim (2004:98), Upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD secara umum ada dua cara, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada objek dan subjek yang sudah ada. Upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, dan aspek personalianya. Sedangkan ekstensifikasi adalah melakukan usaha – usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 tahun 2009 pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa

imbangan langsung yang seimbang yang dapat dipasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2004 yang dimaksud dengan pajak daerah adalah semua pungutan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai pajak atas daerah yang bersangkutan dan belum dipungut oleh pemerintah pusat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan mengenai definisi pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggara dan pembangunan daerah.

Penerimaan pajak daerah bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan tiap-tiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Dasar hukum pajak daerah yang berlaku sekarang adalah Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Perubahan dari Undang – undang nomor 34 tahun 2000.

Berdasarkan undang-undang di atas maka ditetapkan sebelas jenis pajak daerah yaitu:

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a) Pajak kendaraan bermotor
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

- d) Pajak pengambilan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan
- 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Pengambilan bahan galian golongan C
 - g) Pajak Parkir

b. Jenis – jenis Pajak Daerah

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 jenis pajak daerah yang dipungut pemerintah kabupaten atau kota sebagai berikut :

1). Pajak Hotel

Pungutan atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2). Pajak restoran

Pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk catering.

3). Pajak Reklame

Pungutan daerah atas semua penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dan untuk memperkenalkan ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang.

4). Pajak hiburan

Pungutan daerah atas semua yang menyelenggarakan hiburan. Hiburan adalah semua jenis permainan, pertunjukan, ketangkasan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang menonton atau menikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk pengguna fasilitas untuk olahraga.

5). Pajak penerangan jalan

Pajak atas pengguna tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6). Pajak pengelolaan bahan galian

Pungutan daerah atas kegiatan eksploitasi bahan galian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7). Pajak parkir

Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

c. Tarif Pajak

Pasal 3 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar:

- 1) Pajak kendaraan bermotor 5% (lima persen)
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor 10%
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%
- 4) Pajak pengambilan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan 20% (dua puluh persen)
- 5) Pajak hotel dan restoran 10% (sepuluh persen)
- 6) Pajak hiburan 35% (tiga puluh lima persen)
- 7) Pajak reklame 25%(dua persen lima persen)
- 8) Pajak penerangan jalan 10%(sepuluh persen)
- 9) Pajak pengambilan bahan galian golongan C 20% (dua puluh persen):
- 10) Pajak parker 10% (sepuluh persen)

d. Objek Pajak Daerah

Menurut UU No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Siti Resmi (2005:74) pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Adapun objek pajak yaitu :

1). Objek Pajak Hotel

Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang tidak termasuk objek pajak antara lain jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan pemerintah daerah, jasa sewa apartemen, jasa tempat tinggal asrama di pusat pendidikan atau

kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, dan jasa biro perjalanan.

2). Objek Pajak Restoran

Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan umum maupun di tempat, termasuk pengadaan makanan dan minuman yang dananya bersumber dari APBD/APBN maupun oleh masyarakat umum.

3). Objek Pajak Hiburan

Jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana yang dimaksud adalah tontonan film, pertunjukan kesenian, kontes kecantikan, pertandingan olahraga, pameran, dan diskotik/karaoke/klub malam.

4). Objek Pajak Reklame

Semua penyelenggaraan reklame meliputi reklame papan, reklame kain, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, dan reklame peragaan. Yang tidak termasuk objek pajak adalah penyelenggaraan reklame melalui internet/televisi/radio, label/merk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya, reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dan nama pengenal usaha atau profesi yang



dipasang melekat pada bangunan tempat usaha diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha tersebut.

5). **Objek Pajak Penerangan Jalan**

Batu tulis, batu setengah permata batu kapur, dan batu apung. Yang tidak termasuk objek pajak diantaranya kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan pemerintah daerah dan rumah tangga, penggalian tanah dalam kegiatan pertambangan umum, pemancangan tiang listrik, telepon, pipa air dan gas.

e. Subjek Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2004:14) yang menjadi subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Adapun subjek pajak daerah yaitu :

1). **Subjek Pajak Hotel**

Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan uang mengusahakan hotel.

2). **Subjek Pajak Restoran**

Orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran.

3). **Subjek Pajak Hiburan**

Orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

4). Subjek Pajak Reklame

Orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

5). Subjek Pajak Penerangan Jalan

Orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

6). Subjek Pajak Penggalian Bahan Golongan C

Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan bahan galian golongan C.

f. Upaya- upaya untuk meningkatkan Pajak Daerah

1). Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial.

2). Memperkuat Proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain dengan mempercepat penyusunan peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3). Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

- 4). Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

- 5). Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

g. Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Tentang pajak

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 4 disebutkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- 2) Peraturan Daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut
- 3) Peraturan Daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
 - a) Nama, objek dan subjek pajak.
 - b) Dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak.
 - c) Wilayah pemungutan
 - d) Masa pajak
 - e) Penetapan
 - f) Tata cara pembayaran dan penagihan

- g) Kadaluwarsa
- h) Sanksi administrasi dan
- i) Tanggal mulai berlakunya.

h. Kontribusi Pajak Daerah

Zurniawati (dalam buku Abdul, 2002: 3351) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan kontribusinya. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hubungan ini dapat dinyatakan dalam risiko kontribusi yaitu perbandingan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006:126) kontribusi memiliki arti iuran atau sumbangan, sedangkan jika dikaitkan dengan pengelolaan keuangan daerah di bidang perpajakan kontribusi menurut Syarif Daud dalam Abdul Halim (2006:163) Kontribusi Pajak Daerah adalah besarnya sumbangan suatu jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Daerah merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah mempunyai peranan yang cukup besar dalam mengisi kas daerah. Sebagai salah satu komponen PAD, pajak daerah memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara tepat dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah.

Semakin besar penerimaan dari pajak daerah maka semakin besar kas untuk daerah dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka ketergantungan kepada pemerintah dan pembangunan di daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah.

3. Hubungan Antara Pajak Dengan Pendapatan

Dalam suatu jenis pajak kita akan mengenal istilah pajak proporsional, pajak, progresif, dan pajak regresif yang tentunya berkaitan dengan masalah pendapatan. Suatu pajak akan disebut proporsional jika mengenakan tarif persentase yang sama tanpa melihat pendapatan seseorang. Sehingga setiap pembayaran pajak dikenakan tarif pajak dalam proporsi yang sama dari pendapatannya. Sedangkan untuk pajak progresif sama sekali dengan pajak proporsional pajak progresif adalah pajak mengenakan tarif dalam persentase yang meningkat menurut bertambah tingginya pendapatan seseorang. Sedangkan pajak regresif adalah pajak yang mengenakan tarif persentase yang lebih rendah pada mereka yang berpendapatan tinggi. Istilah progresif dan regresif mungkin akan menimbulkan kecacauan pengertian. Kata-kata ini merupakan istilah teknis yang berkaitan dengan proporsi pajak terhadap berbagai pendapatan.

Menurut Siti (2008: 07), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

a. Menurut golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa.

b. Menurut Sifat

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya

2) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

4. Efektivitas

Prinsip Pemilihan Ukuran Kinerja Efektivitas berhubungan dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapaisasaran atau tujuan akhir kebijakan.

Mengukur tingkat output dari organisasi sector public terhadap target-target pendapatan sector public. Pengukuran tingkat efektifitas memerlukan data-data realisasi pendapatan anggaran atau target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektifitas.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2001 : 11) jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya yaitu :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai yang variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian yang bersifat membandingkan disini variabelnya sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi tetap untuk sampel lebih dari atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Pada penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan berdasarkan tingkat eksplanasinya yaitu jenis penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui nilai yang variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah jln. Merdeka no.21 Palembang

C. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti bagaimana variabel tersebut diukur.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dapat dilihat pada tabel III.1 sebagai berikut :

Tabel III.1
Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Kontribusi Pajak Daerah	Perhitungan jumlah sumbangan yang berasal dari total penerimaan pajak daerah yang dipungut berdasarkan obyek pajak dan subyek yang telah ditentukan	a) Realisasi Pajak Daerah b) Realisasi pendapatan Asli Daerah
2	Efektivitas Pajak Daerah	Prinsip Pemilihan Ukuran Kinerja Efektivitas berhubungan dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai	a)Realisasi Pajak Daerah b)Anggaran Pajak Daerah
3	Upaya – upaya untuk meningkatkan PAD	Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan dari sumber – sumber pendapatan daerah	a) Intensifikasi PAD b) Ekstenfikasi PAD

Sumber : penulis

D. Data yang Diperlukan

Menurut Nur Indiantoro dan Bambang (2002:146), sumber data penelitian terdiri dari

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dan dicatat oleh orang atau pihak lain

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang tahun 2009 – 2011, data dan Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2009 – 2011.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nur Indiantoro dan Bambang (2002:152) teknik pengumpulan data terdiri dari:

1. Observasi

Pengumpulan data dengan cara pencatatan secara cermat dan sistematis

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden

3. Kuisioner

Pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi

4. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan penyidikan melalui sumber dokumen, baik yang terjadi dimasa lalu maupun di masa sekarang

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu dilakukan pengumpulan dokumen/data yang relevan mengenai daftar target dan realisasi pajak daerah, serta data mengenai realisasi penerimaan PAD Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Soeratno dan Lincolyn Arsad (1998:126) analisis data terdiri dari:

a. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori - kategori.

b. Analisis Kualitatif

Analisis kuantitatif adalah dilakukan dengan menganalisis dan menilai semua data yang diperoleh melalui perhitungan empiris (rumusan).

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menganalisis dan menilai semua data yang diperoleh melalui perhitungan empiris (rumusan). Sedangkan analisis kualitatif menganalisis dan menilai semua data yang diperoleh dari objek penelitian serta membandingkannya dengan teori-teori dan ketentuan yang berlaku umum.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menyediakan tabel dan penjelasan tentang kontribusi pajak daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Teknik Analisis dengan menggunakan rumus :

a. Kontribusi

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

b. Efektifitas

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Singkat Tentang Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dinas Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Tingkat II Palembang Nomor 9 Tahun 1975 pada tanggal 11 November 1975, Dimana sebelumnya bidang pajak dan retribusi pada Daerah Tingkat I dan Tingkat II merupakan urusan bagian Biro Keuangan Daerah masing-masing yang dibentuk dengan status dan kedudukan sebagai aparat pelaksanaan Pemerintah Daerah yang bertempat di Kota Palembang serta memiliki tugas mengelola segala hal di bidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 1980 dibentukkan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Palembang yang struktur dan tata kerja organisasinya berlaku sama di seluruh Indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Perda Nomor 3 tahun 1990 kemudian perda Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang (Lembaran daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9) Hal ini dilakukan seiring dengan adanya beberapa perubahan seperti penambahan penduduk serta usaha

penyempurnaan dan penyelesaian struktur organisasi Dipenda Kota Palembang.

2. Visi dan Misi

Dinas Pendapatan Daerah sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah se-Kota Palembang dalam menjalankan tugasnya memiliki Visi **“Pendapatan Daerah yang Maksimal Untuk Pembangunan Kota Palembang”** yang merupakan cara pandang jauh kedepan agar tetap dapat eksis dan inovatif.

Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut, diperlukan adanya misi sebagai pedoman arah bagi Pengelolaan Penerimaan pendapatan Daerah dan dalam menyampaikan pelayanan masyarakat Kota Palembang, dimana Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membayar pajak
- b. Modernisasi pajak

3. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

a. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas pendapatan Daerah telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu :

- 1) Terwujudnya pendapatan daerah yang maksimal
- 2) Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas di bidang pajak

b. Sasaran

Sesuai dengan Visi , Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah :

- 1) Meningkatnya penerimaan pajak dari tahun lalu
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan pajak
- 3) Meningkatnya pelaporan yang disusun tepat waktu
- 4) Meningkatnya kualitas aparatur

c. Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, dan sasaran sebagaimana pada Perencanaan Strategis Dinas pendapatan Daerah, maka ditetapkan kebijakan yaitu :

- 1) Mengutamakan intensifikasi pada penerimaan pajak yang belum mencapai target
- 2) Pengembangan potensi pendapatan daerah diarahkan ke jenis objek pajak daerah yang baru
- 3) Mengutamakan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan pajak secara *online*
- 4) Memberikan *reward* dan *punishment* kepada aparatur

4. Tugas dan Fungsi

Setelah melihat susunan organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang secara umum, maka selanjutnya dikemukakan secara garis besar tugas dan fungsi dari masing-masing unit yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- b) Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian.
- c) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan
- d) Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang retribusi dan pendapatan lain-lain
- e) Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya
- f) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

- g) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas
- h) Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Bagian Sekretariat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi. Bagian sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan
- b) Pelaksnaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan
- c) Pengelolaan urusan keuangan
- d) Pengelolaan urusan administrasi dan kepegawaian
- e) Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
- f) Pengkoordinasian penyusunan program penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu
- g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tugas sekretaris adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana program kerja dan kegiatan kesekretariatan untuk diusulkan kepada kepala dinas
- 2) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada sub-sub bagian sesuai dengan tugas dan fungsi
- 3) Mempelajari dan menindak lanjuti petunjuk yang diberikan oleh kepala dinas

- 4) Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya
- 5) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi umum
- 6) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dinas
- 7) Menyusun laporan pertanggungjawaban kepala dinas kepada Walikota

3. Bagian Program

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi pemantauan, pengkajian, pengembangan dan penyuluhan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas. Bidang Program mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang program
- b) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang program
- c) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang program
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- e) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi lain dibidang program
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas bagian Program adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana program kerja dan kegiatan program
- b) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada seksi-seksi yang di bawahnya sesuai tugas pokok dan fungsi
- c) Mempelajari dan menindaklanjuti petunjuk yang diberikan oleh kepala dinas
- d) Membina, memotivasi dan melakukan pengawasan terhadap para kepala seksi dan staff dibawahnya
- e) Mengoreksi dan memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang diajukan oleh para kepala seksi di bawahnya
- f) Memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya
- g) Menyusun petunjuk teknis dan bahan kebijakan program
- h) Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang program
- i) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan dana pengendalian di bidang program
- j) Melaksanakan pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan penyuluhan perpajakan



4. Bagian Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi pendataan dan pengelolaan data, melakukan penetapan dan pemeriksaan terhadap subjek dan objek pajak.

Tugas Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendataan dan penetapan.
- b) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pendataan dan penetapan.
- c) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang pendataan dan penetapan.
- d) Pelaksanan monitoring, evakuasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- e) Pelaksanan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi lain dibidang pendataan dan penetapan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Bagian Penagihan dan pembukuan

Bidang Penagihan dan pembukuan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan serta melakukan pertimbangan dan keberatan pajak.

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penagihan dan pembukuan
- b) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penagihan dan pembukuan
- c) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang penagihan dan pembukuan
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- e) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi lain di bidang penagihan dan pembukuan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Bagian Bagi Hasil dan Penerimaan Lain-lain

Bidang bagi hasil dan penerimaan mempunyai fungsi :

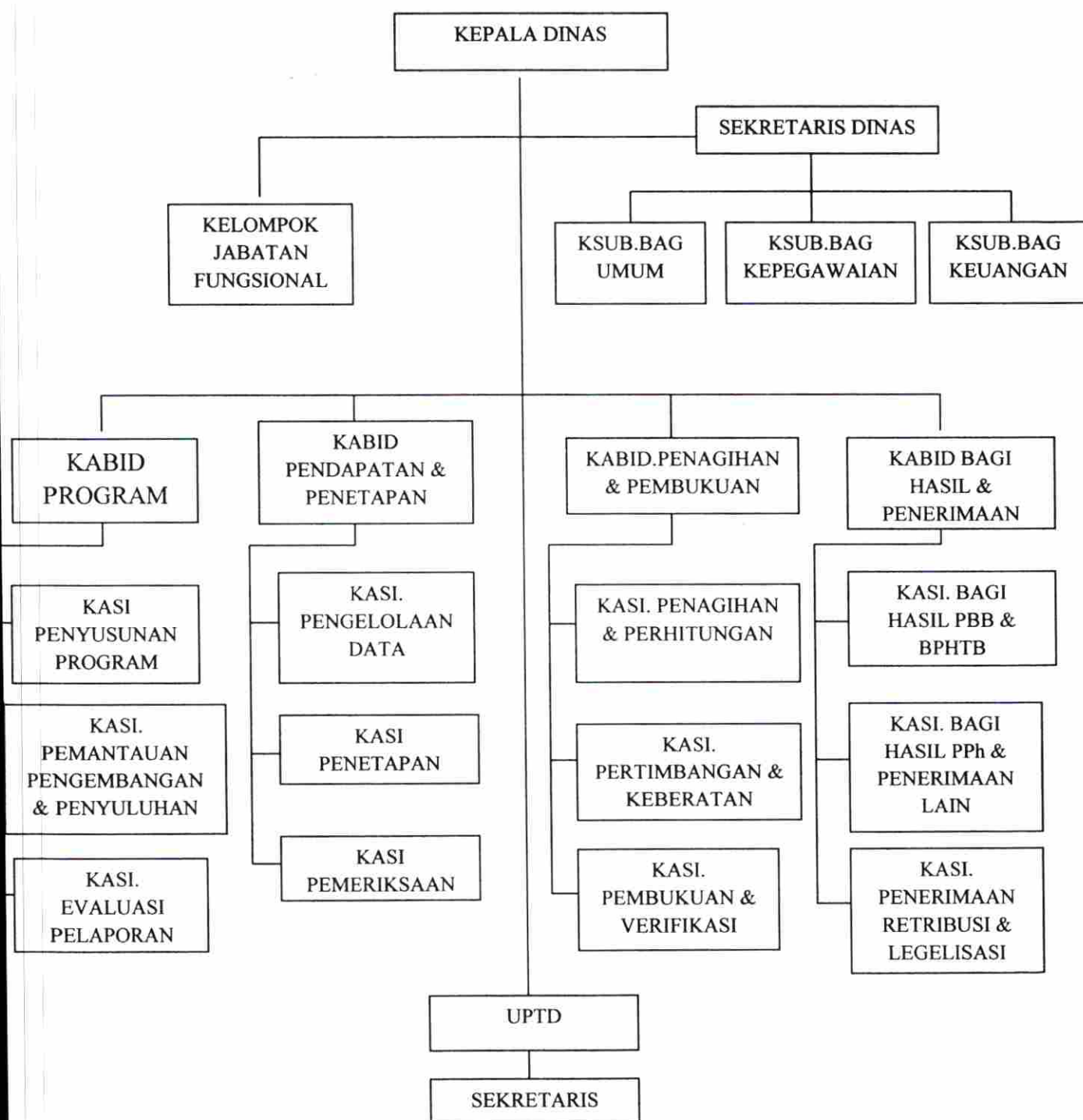
- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bagi hasil dan penerimaan lain-lain
- b) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang bagi hasil dan penerimaan lainnya
- c) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang bagi hasil dan penerimaan lain
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

- e) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain di bidang bagi hasil dan penerimaan lain-lain
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. Bagian Pelaksana Teknis Dinas

Bagian pelaksana teknis dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya sesuai dengan asas dan prosedur yang berlaku di Kota Palembang.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi



Sumber : Dispenda Kota Palembang, 2012

B. PEMBAHASAN

Kontribusi Pajak Daerah merupakan besarnya sumbangan pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah bisa dilihat dari realisasi penerimaan PAD itu sendiri, perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi penerimaan PAD akan menghasilkan seberapa besar kontribusi yang diberikan sektor pajak daerah terhadap penerimaan PAD, sehingga kemudian dapat dikaji sejauh mana tingkat efektivitas dari pemanfaatan sumber-sumber keuangan daerah tersebut.

Melalui perhitungan tingkat efektivitas pajak daerah dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu, disamping itu perhitungan tingkat efektivitas dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam menentukan besarnya target penerimaan pajak daerah yang harus dicapai pada periode yang akan datang. Penargetan realisasi pajak daerah dimaksudkan untuk mendorong kinerja pajak daerah, dalam upaya pemerintah daerah mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

Penerimaan Pajak Daerah dapat dikatakan efektif apabila selisih realisasi penerimaan dan target yang dianggarkan mengalami selisih positif (lebih dari 100%) dan dikatakan kurang ataupun tidak efektif apabila selisih dari realisasi dengan target yang dianggarkan mengalami selisih negatif (kurang dari 100%)

1. Kontribusi Pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

Kontribusi pajak daerah dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi penerimaan PAD. Berdasarkan tabel I.1 besarnya perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan PAD di Kota Palembang Tahun Anggaran 2009-2011 Sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

a. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2009

$$\text{Kontribusi} = \frac{84.696.563.176,60}{1.219.171.711.299,20} \times 100 \% = 6,94\%$$

b. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2010

$$\text{Kontribusi} = \frac{104.047.313.437}{1.648.325.888.374,66} \times 100 \% = 6,31 \%$$

c. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2011

$$\text{Kontribusi} = \frac{207.746.349.410,40}{1.917.931.790.520,91} \times 100 \% = 10,83\%$$

Efektivitas penerimaan pajak daerah dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

a. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2009

$$\text{Efektivitas} = \frac{84.696.563.176}{87.485.932.360} \times 100 \% = 96,81\%$$

b. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2010

$$\text{Efektivitas} = \frac{104.047.313.437}{93.420.835.800} \times 100 \% = 111,37\%$$

c. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2011

$$\text{Efektivitas} = \frac{207.746.349.410}{172.117.431.035} \times 100 \% = 120,70\%$$

Besarnya hasil kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan PAD dan tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kota Palembang tergambar pada tabel IV.2 di bawah ini :

Tabel IV.1

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang

No	Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	PAD	% Kontribusi Pajak Daerah	%Efektivitas Pajak Daerah
1	2009	87.485.932.360	84.696.563.176,60	1.219.171.711.299,20	6,94	96,81
2	2010	93.420.835.800	104.047.313.437,00	1.648.325.888.374,66	6,31	111,37
3	2011	172.117.431.035	207.746.319.410,40	1.917.931.790.520,91	10,83	120,70

Berdasarkan Tabel IV.1 dapat dilihat pada periode tahun 2009-2011 realisasi penerimaan pajak secara umum mengalami kenaikan setiap tahunnya, yang diimbangi dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang setiap tahunnya juga meningkat. Pada tahun 2009

- 2010 persentase kontribusi pajak daerah mengalami penurunan, sedangkan dari tahun 2010 – 2011 persentase kontribusinya mengalami kenaikan.

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah di Kota Palembang periode tahun 2009-2011 sudah cukup efektif dengan meningkatnya kontribusi dan efektivitas pada setiap tahunnya.

Untuk menganalisis sejauh mana besarnya peranan kontribusi masing-masing objek pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah berikut adalah perhitungan kontribusi objek pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah dan tingkat efektivitas penerimaan objek pajak daerah di Kota Palembang tahun 2009-2011.

Perhitungan Kontribusi Objek-objek pajak daerah terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah

1) Tahun Anggaran 2009

a) Pajak Hotel

$$\text{Kontribusi} = \frac{10.353.748.458}{84.696.563.176} \times 100 \% = 12,22\%$$

b) Pajak Restoran

$$\text{Kontribusi} = \frac{16.095.416.841}{84.696.563.176} \times 100 \% = 19,00\%$$

c) Pajak Hiburan

$$\text{Kontribusi} = \frac{4.366.158.504}{84.696.563.176} \times 100 \% = 5,15\%$$

d) Pajak Reklame

$$\text{Kontribusi} = \frac{4.225.282.834}{84.696.563.176} \times 100 \% = 4,98\%$$

e) Pajak Penerangan Jalan

$$\text{Kontribusi} = \frac{47.226.315.254}{84.696.563.176} \times 100 \% = 55,75\%$$

f) Pajak Galian Golongan C

$$\text{Kontribusi} = \frac{540.113.195}{84.696.563.176} \times 100 \% = 0,63 \%$$

g) Pajak Parkir

$$\text{Kontribusi} = \frac{1.889.528.090}{84.696.563.176} \times 100 \% = 2,23\%$$

2) Tahun Anggaran 2010

a) Pajak Hotel

$$\text{Kontribusi} = \frac{14.094.700.545}{104.047.313.437} \times 100 \% = 13,54 \%$$

b) Pajak Restoran

$$\text{Kontribusi} = \frac{19.226.002.354}{104.047.313.437} \times 100 \% = 18,47\%$$

c) Pajak Hiburan

$$\text{Kontribusi} = \frac{5.113.107.739}{104.047.313.437} \times 100 \% = 4,91\%$$

d) Pajak Reklame

$$\text{Kontribusi} = \frac{4.603.540.213}{104.047.313.437} \times 100 \% = 4,42\%$$

e) Pajak Penerangan Jalan

$$\text{Kontribusi} = \frac{58.035.666.496}{104.047.313.437} \times 100 \% = 55,77\%$$

f) Pajak Galian Golongan C

$$\text{Kontribusi} = \frac{600.411.497}{104.047.313.437} \times 100 \% = 0,57 \%$$

g) Pajak Parkir

$$\text{Kontribusi} = \frac{2.373.884.593}{104.047.313.437} \times 100 \% = 2,28\%$$

3) Tahun Anggaran 2011

a) Pajak Hotel

$$\text{Kontribusi} = \frac{18.596.699.903}{207.746.349.410} \times 100 \% = 8,95 \%$$

b) Pajak Restoran

$$\text{Kontribusi} = \frac{24.303.405.188}{207.746.349.410} \times 100 \% = 11,69\%$$

c) Pajak Hiburan

$$\text{Kontribusi} = \frac{5.967.246.597}{207.746.349.410} \times 100 \% = 2,87\%$$

d) Pajak Reklame

$$\text{Kontribusi} = \frac{7.937.771.136}{207.746.349.410} \times 100 \% = 3,82\%$$

e) Pajak Penerangan Jalan

$$\text{Kontribusi} = \frac{69.004.384.193}{207.746.349.410} \times 100 \% = 33,21\%$$

f) Pajak Penerangan Jalan non PLN

$$\text{Kontribusi} = \frac{2.230.546.054}{207.746.349.410} \times 100 \% = 1,07\%$$

g) Mineral Bukan Logam dan Batuan

$$\text{Kontribusi} = \frac{858.954.037}{207.746.349.410} \times 100 \% = 0,00 \%$$

f) Pajak Parkir

$$\text{Kontribusi} = \frac{3.816.026.337}{207.746.349.410} \times 100 \% = 0,41 \%$$

g) Pajak Air Bawah Tanah

$$\text{Kontribusi} = \frac{6.651.000}{207.746.349.410} \times 100 \% = 0,00\%$$

h) Pajak Sarang Walet

$$\text{Kontribusi} = \frac{78.530.000}{207.746.349.410} \times 100 \% = 0,03\%$$

i) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

$$\text{Kontribusi} = \frac{74.946.134.964}{207.746.349.410} \times 100 \% = 36,07\%$$

Besarnya hasil kontribusi yang diberikan objek pajak daerah terhadap pajak daerah di Kota Palembang dapat dilihat pada tabel IV.2 sebagai berikut :

Tabel IV.2

**Kontribusi Objek Pajak Daerah terhadap Pajak Daerah
Kota Palembang
Tahun 2009-2011**

No	Keterangan	Tahun Penerimaan					
		2009		2010		2011	
		Realisasi	% Kontribusi	Realisasi	% Kontribusi	Realisasi	% Kontribusi
I	Objek Pajak Daerah						
	Pajak Hotel	10.353.748.458	12,22	14.094.700.545	13,54	18.596.669.903	8,95
	Pajak Restoran	16.095.416.841	19,00	19.226.002.354	18,47	24.303.405.188	11,69
	Pajak Hiburan	4.366.158.504	5,15	5.113.107.739	4,91	5.967.246.597	2,87
	Pajak Reklame	4.225.282.834	4,98	4.603.540.213	4,42	7.937.771.136	3,82
	Pajak Penerangan Jalan PLN	47.226.315.254	55,75	58.035.666.496	55,77	69.004.384.193	33,21
	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	--	0,63	--	0,57	2.230.546.054	1,07
	Pajak Mineral bukan Logam dan batuan	--		--		858.954.037	
	Pajak Parkir	1.889.528.090	2,23	2.373.884.593	2,28	3.816.026.337	0,41
	Pajak Air bawah tanah	--		--		6.651.000	
	Pajak Sarang burung wallet	--		--		78.530.000	0,03
	Pajak Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan	--		--		74.946.134.964	36,07
	Pajak Perolehan Bahan Galian Gol C	--		600.411.497		--	
2	Pajak Daerah	1.219.171.711.299		1.648.325.888.374		1.917.931.790.500	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, data diolah

Dari tabel IV.2 dapat dilihat bahwa secara umum kontribusi beberapa objek pajak daerah yang setiap tahunnya meningkat. Dari gambaran tabel tersebut terlihat bahwa kontribusi yang diberikan Pajak Hotel terhadap pajak daerah pada tahun 2009-2010 mengalami kenaikan sedangkan dari tahun 2010-2011 mengalami penurunan.

Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah mengalami kenaikan pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan yang sejalan dengan kenaikan realisasi penerimaannya. Kondisi ini dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah objek pajak Restoran tersebut. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa kondisi yang belum cukup baik dari sektor Pajak Restoran yang ada di Kota Palembang. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap pajak daerah mengalami penurunan pada setiap tahunnya, hal ini menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah.

Kontribusi penerimaan pajak reklame dan kontribusi penerimaan pajak bahan golongan C secara umum menggambarkan kondisi yang kurang baik karena realisasi penerimaan terhadap pajak daerah selalu mengalami penurunan pada setiap tahunnya.

Kontribusi pajak daerah yang diberikan dari sector pajak penerangan jalan realisasi penerimaannya cenderung berfluktuatif terlihat dari kontribusi penerimaan terhadap pajak daerah pada tahun 2010 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2011 cenderung turun.

Dari analisa mengenai kontribusi pajak daerah dapat dilihat bahwa penerimaan daerah di Kota Palembang hal ini juga tergambar dari belum efektifnya penerimaan pajak daerah periode tahun 2009-2011 sehingga peranan pajak daerah di Kota Palembang kurang efektif dan kurang baik yang merupakan gambaran kurang baiknya Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah.

2. Upaya-upaya untuk Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang.

Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah sehingga berdampak positif pada pembangunan daerah. Upaya-upaya intensifikasi PAD yang perlu dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yaitu

1). Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial.

2). Memperkuat Proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain dengan mempercepat penyusunan peraturan daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3). Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4). Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5). Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa data yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum peranan pajak daerah dalam hal kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang belum cukup efektif karena dilihat dari sektor pajak tiap tahunnya cenderung fluktuatif. Sedangkan tingkat Efektivitas pajak daerah dalam upaya meningkatkan PAD dari tahun 2009 – 2011 mengalami peningkatan.

Upaya – upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang melalui Intensifikasi PAD yaitu evaluasi sumber – sumber pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola PAD, peningkatan dan pengembangan keuangan daerah, dan meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Ekstensifikasi PAD yaitu menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran kepada Dinas pendapatan Daerah Kota Palembang yaitu :

Pemerintah Daerah Kota Palembang melalui dinas terkait perlu melakukan evaluasi kinerja dan mengidentifikasi apakah pada pos-pos pajak daerah tertentu target yang ditetapkan terlalu tinggi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada atau belum optimalnya pemungutan pajak daerah tersebut sehingga kontribusi penerimaan pajak daerah di Kota Palembang belum efektif. Hendaknya petugas pemungutan harus handal dan kompeten serta dalam melakukan pemungutan mereka harus diberi fasilitas yang memadai sehingga target yang diinginkan dapat realisasi. Lebih tegas lagi dalam menetapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mau membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Indra Bastian. 2001. **Akuntansi Sektor Publik Indonesia**. Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Lin, Nan Alih Bahasa W. Gulo. 2002. **Metodologi Penelitian**. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. **Akuntansi Sektor Publik**, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- _____, 2002. **Perpajakan Edisi Revisi 2002**, Andi Yogyakarta.
- Marihot P Siahaan. 2005. **Pajak dan Retribusi Daerah**, Raja Grafindo. Republik Indonesia Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perpajakan.
- _____, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang No. 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____, (2004-a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____, (2004-b) Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Suparmoko, 2002. **Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**. Edisi Pertama. Andi Yogyakarta.
- Abdul Halim. 2004. **Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi, (UPP) AMP YKPAN**, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2004. **Metode Penelitian Bisnis, Cetakan 7**. Penerbit. CV. Afabeta, Bandung.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Merdeka No.21 Palembang, Propinsi Sumatera Selatan
Telepon(0711)352282 Faximili(0711)317393 Kode Pos, 30132
E-Mail : Kepala@dispenda.palembang.go.id Website : wwdispenda.palembang.go.id

SURAT KETERANGAN

NCMOR : 070 / 983 /PENDA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. H. BUKMAN LIAN, MM,M.Si

J a b a t a n : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Novaliana S

NIM : 22 2008 071

Telah melaksanakan Pengambilan Data pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 30 Juli 2012



Drs. H. BUKMAN LIAN, MM.,M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 195807161979121002



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA : Dwi Novaliana Saputri	PEMBIMBING
: 22 2008 071	KETUA : Lis Djuniar, S.E, M.Si
SAN : AKUNTANSI	ANGGOTA :
SKRIPSI : ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG	

TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
01/7/2012	Bab I			Pabab I
05/7/2012	Bab I, II & III			Pabab I
08/7/2012	Bab I, II & III			Acc
02/8/2012	Bab IV & V			Pabab I
02/8/2012	Bab VI & VII			Pabab I
03/8/2012	Bab VI & VII			Acc

CATATAN	Di keluarkan di : Palembang
	Pada tanggal : / /
siswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, dihitung sejak tanggal ditetapkan	 Drs. Sunardi, S.E, M.Si





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)
 JURUSAN AKUNTANSI (S1)
 MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

IZIN PENYELENGGARAAN

No. 011/2011 K-IP/2011
 No. 024/2011 K-II/2011
 No. 042/2011 K-IP/2009

AKREDITASI

No. 018/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2008 (B)
 No. 044/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
 No. 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Selasa, 14 Agustus 2012
 Waktu : 09.00 s/d 12.00 WIB
 Nama : Dwi Novaliana Saputri
 NIM : 222008071
 Program Studi : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Skripsi : ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Lis Djuniar, S.E, M.Si	Pembimbing	7/9/2012	
2	Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si	Ketua Penguji	15/12/2013	
3	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Penguji I	15/9. 2012	
4	Lis Djuniar, S.E, M.Si	Penguji II	7/9/2012	

Palembang, Agustus 2012
 An. Dekan
 Ketua Program Studi Akuntansi

Drs. Sunardi, S.E, M.Si
 NIDN/NBM : 0206046303/784021

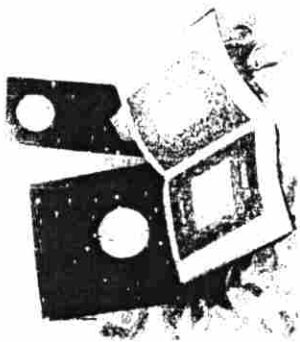
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

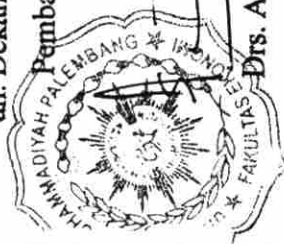
NAMA : DWINOVALIANA SAPUTRI
NIM : 222008071
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 04 Agustus 2012

an. Dekan
Pembantu Dekan IV



Drs. Antoni, M.H.I.

Unggul dan Islami

BIODATA PENULIS

Nama : Dwi Novaliana Saputri
NIM : 22 2008 071
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 05 November 1990
Alamat : Jl. Brigjen Hasan Kasim RT.52 No.14 Palembang
No. Telpon : 081933328232
Nama Orang Tua
1. Ayah : Ilyas
2. Ibu : Kowiah
Pekerjaan orang tua
1. Ayah : KOPKAR PUSRI
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Palembang, September 2012
Penulis,

Dwi Novaliana Saputri